

## BAB IV KESIMPULAN

Kesepakatan Uni Eropa-Turki atau *EU-Turkey Deal* yang dicapai pada tahun 2016 merupakan reaksi terhadap situasi pengungsi Suriah yang memburuk. Salah satu landasan dasar kesepakatan tersebut adalah janji Uni Eropa untuk menawarkan bantuan keuangan kepada Turki. *Community security* dalam konteks pengungsi Suriah di Turki adalah memastikan bahwa pengungsi dapat hidup dengan aman dan damai dalam masyarakat tempat mereka tinggal, dengan fokus pada integrasi sosial, perlindungan dari kekerasan, dan pembangunan hubungan harmonis antara pengungsi dan masyarakat lokal. Selain itu, anggaran *EU-Turkey Deal* telah memainkan peran penting dalam mewujudkan *community security* pengungsi Suriah di Turki selama krisis pengungsi Suriah. Namun, pelaksanaan perjanjian ini menghadapi beberapa rintangan dan dinamika yang rumit.

Perwujudan *community security* dalam lingkup Kesepakatan Uni Eropa-Turki merupakan tugas yang rumit. Meskipun ada upaya besar untuk melindungi pengungsi Suriah, masih banyak yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan dan martabat mereka. Ancaman kekerasan terhadap pengungsi, dan tekanan pada layanan publik merupakan masalah yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara Turki, Uni Eropa, dan LSM. Saran yang harus dilaksanakan termasuk memperkuat sistem perlindungan pengungsi dengan menetapkan langkah-langkah perlindungan seperti proses pengaduan yang memadai dan akses ke keadilan. Memantau situasi pengungsi di Turki secara berkala dan menilai efisiensi kebijakan yang ada. Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, Uni Eropa dan Turki harus bekerja sama lebih erat, serta lebih memperhatikan kebutuhan jangka panjang para pengungsi dan penduduk lokal Turki.

Dengan demikian, berdasarkan pada kacamata *community security*, Kerja sama antara Uni Eropa dan Turki dalam EU-Turkey Deal dalam mewujudkan *community security* pengungsi Suriah di Turki dari tahun 2017 hingga 2022 tidak terwujud dengan baik, meskipun berhasil mengurangi arus pergerakan pengungsi ilegal ke Eropa. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek perjanjian yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu permasalahan tersebut adalah alokasi

dana kemanusiaan yang terbukti tidak cukup untuk memastikan stabilitas politik pengungsi Suriah di Turki. Perselisihan internal yang kemudian mengakibatkan kesulitan politik antara keduanya juga menjadi salah satu unsur yang membuat *EU-Turkey Deal* kurang ideal untuk menjamin keselamatan pengungsi Suriah. Banyak program yang dibuat oleh pemerintah Turki dengan dana bantuan yang disediakan oleh Uni Eropa menemui beberapa tantangan dan kendala dalam memenuhi hak-hak pengungsi Suriah, termasuk kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antara pemerintah Turki dan organisasi yang terlibat dalam penyaluran bantuan.

Kondisi pengungsi Suriah masih rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan, yang menjadikannya sebagai salah satu contoh kegagalan Uni Eropa dan Turki dalam melaksanakan kerja sama dalam mewujudkan *community security* pengungsi Suriah karena diskriminasi dan kekerasan merupakan sikap yang bertentangan dengan indikator *community security*, dimana indikator tersebut mencakup akses terhadap hak dan keadilan, dimana indikator ini melihat sejauh mana pengungsi dapat mengakses bantuan hukum atau perlindungan hukum ketika menghadapi masalah hukum atau pelanggaran hak, bagaimana tingkat pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar pengungsi, termasuk hak atas kebebasan bergerak, perlindungan dari pengusiran paksa, dan hak atas pekerjaan.